



**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

# REVIU PENETAPAN KINERJA TAHUN (PKT) 2022

JL. LETJEND SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT

TLP & FAX : 021-4254257

WEBSITE : [WWW.PT-JAKARTA.GO.ID](http://WWW.PT-JAKARTA.GO.ID)

E-MAIL : [INFO.PTDKJAKARTA@MAIL.COM](mailto:INFO.PTDKJAKARTA@MAIL.COM)

IG : @PENGADILANTINGGI\_DKI\_JAKARTA



## BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa





# PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : [info.ptjakarta@gmail.com](mailto:info.ptjakarta@gmail.com) Website : [www.pt-jakarta.go.id](http://www.pt-jakarta.go.id)

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022


Kami telah mereviu Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) ini.



Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab

  
**Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Nip. 19560405 198203 1 005

**REVIU SHEET**  
**Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2022**  
**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Indikator pada Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2022	Lampiran
2	Perubahan Target pada Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2022	Lampiran



Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.  
Nip. 19560405 198203 1 005

**REVIU PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :





Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. BAMBANG MYANTO, SH., MH.**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

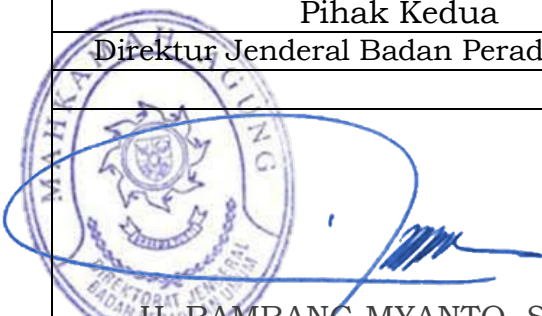
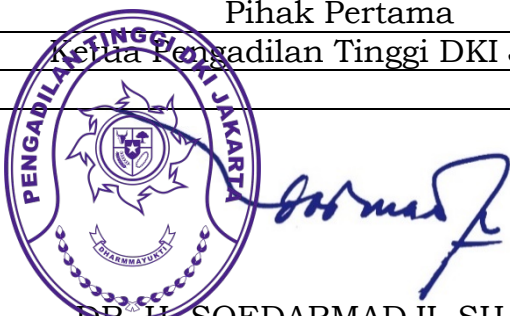
Jakarta, 01 September 2022

 Pihak Kedua	 Pihak Pertama
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	
H. BAMBANG MYANTO, SH., MH NIP. 19680523 199212 1 002	DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%
		b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	33%
		c.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 46.327.363.000,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta Rupiah)
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 620.350.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah)

Jakarta, 01 September 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	
H. BAMBANG MYANTO, SH., MH NIP. 19680523 199212 1 002	DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUKAERI,SH.,MM**  
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 September 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

**DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Panitera

**BUKAERI,SH.,MM**  
NIP. 19621006 198303 1 005

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%
		b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	33%
		c.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 620.350.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Oima Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, 31 Desember 2021



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Panitera

BUKAERI, SH., MM  
NIP. 19621006 198303 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SSUDIYANTO, SH.,MH.**  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 September 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

  
DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Sekretaris

  
SUDIYANTO, SH.,MH.  
NIP. 19691130 199203 1 001



NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
			4. Perkara Perdata	95%
			5. Perkara Pidana	95%
			6. Perkara Tipikor	95%
		b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	33%
		c.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	
			4. Perkara Perdata	95%
			5. Perkara Pidana	95%
			6. Perkara Tipikor	95%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 46.327.363.000,-
		(Empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.525.000.000,-
		(Lima ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Jakarta, 01 September 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

*DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum*  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Sekretaris

*SUDIYANTO, SH.,MH.*  
NIP. 19691130 199203 1 001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/150/KP.01.1/9/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU (IKU), RENSTRA, PKT, DAN RKT TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : 1. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. bahwa berdasarkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan IKU, RENSTRA, PKT dan RKT Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan / Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Penetapan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2022

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.H.  
NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/139 /KP.01.1/7/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;

c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 28 Juli 2022

*[Handwritten Signature]*  
DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum  
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022  
 Tanggal : 28 Juli 2022  
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022  
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005	Ketua	Pembina
2	Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7	H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
8	Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001	Hakim Tinggi	Anggota
9	Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001	KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	KaBag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
12	Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
13	Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15	Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kasub. Bag TU & RT	Anggota
16	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Kasub.Bag Keu & Pelaporan	Anggota
17	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota
18	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025	Kasub Bag. Renprog & Ang	Anggota
19	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,  
  
  
 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum  
 NIP. 195604051982031005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEBELUM DIREVIU 01 SEPTEMBER 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. PRIM HARYADI, SH., MH**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2022



Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

DR. H. PRIM HARYADI, SH., MH  
NIP. 19630325 198803 1 001



Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	99% 100% 100%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	58%
		d.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat banding	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana	100% 100%
		b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 46.327.363.000,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta Rupiah)
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 620.350.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Oima Puluh Ribuh Rupiah)



Jakarta, 03 Januari 2022

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



DR. H. PRIM HARYADI, SH., MH  
NIP. 19630325 198803 1 001

Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEBELUM DIREVIU 01 SEPTEMBER 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUKAERI,SH.,MM**  
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

**DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Panitera

**BUKAERI,SH.,MM**  
NIP. 19621006 198303 1 005

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Perkara Perdata 5. Perkara Pidana 6. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 4. Perkara Perdata 5. Perkara Pidana 6. Perkara Tipikor	99% 100% 100%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	58%
		d.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat banding	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 3. Perkara Perdata 4. Perkara Pidana	100% 100%
		b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 620.350.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Oima Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, 03 Januari 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama

Panitera

BUKAERI, SH., MM  
NIP. 19621006 198303 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEBELUM DIREVIU 01 SEPTEMBER 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. NASRULLOH, M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

**DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Sekretaris

**Drs. NASRULLOH, M.Si**  
NIP. 19650613 198503 1 001

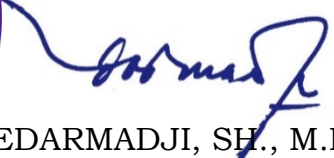
NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 7. Perkara Perdata 8. Perkara Pidana 9. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 7. Perkara Perdata 8. Perkara Pidana 9. Perkara Tipikor	99% 100% 100%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	58%
		d.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat banding	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 5. Perkara Perdata 6. Perkara Pidana	100% 100%
		b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 46.327.363.000,-
		(Empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.525.000.000,-
		(Lima ratus dua puluh lima juta Rupiah)

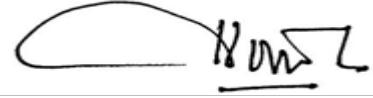
Jakarta, 03 Januari 2022



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

  
DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Sekretaris



Drs. NASRULLOH, M.Si  
NIP. 19650613 198503 1 001